

## **ANALISIS DAMPAK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN DI KEMENTERIAN AGAMA SUMATERA UTARA: STUDI KEPUSTAKAAN**

**Muhammad Aulia Fajri \*<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
[mhdafajri27@gmail.com](mailto:mhdafajri27@gmail.com)

**Muhammad Tareq Aziz**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
[muhmaddtareqa@gmail.com](mailto:muhmaddtareqa@gmail.com)

**Muhammad Arif**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
[muhammadarif@uinsu.ac.id](mailto:muhammadarif@uinsu.ac.id)

### **Abstract**

*Developmental aspirations include achieving high standards of governance. But for this to happen, several requirements must be met, among them accountability and transparency. The degree to which this metric is met can be used to evaluate the effectiveness of financial governance. The purpose of this study is to determine how accountability and transparency affect the standard of financial governance in the North Sumatra Ministry of Religion. Then, conduct in-depth analysis and research to produce clear facts that may be used as study material and to generate ideas about how one variable may affect other factors in future research. It is a qualitative method with a literature review approach. Mendeley, Google Scholar, and international journal articles are needed for a literature review in the process of assessing the facts and information needed to examine hypotheses and theories in further detail. This technique of research necessitates the capacity to investigate findings from research journals, earlier scientific work, and contemporary phenomena in order to critique and analyze them. The findings of this study provide an explanation of the beneficial effects of accountability and transparency on the standard of financial governance in the North Sumatra Ministry of Religion. Image, involvement, and completeness of reports are all provided by transparency. Accountability, meantime, determines the publication's accuracy once a year in compliance with governmental regulations. In order to strengthen the value of the organization, both positively affect the standard of financial governance at the North Sumatra Ministry of Religion.*

**Keywords:** Transparency, Accountability, Financial Quality, Governance.

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

## **Abstrak**

Mewujudkan kualitas tata kelola yang baik merupakan cita-cita pembangunan yang diimpikan. Namun, dalam usaha mewujudkannya diperlukan pemenuhan syarat, salah satunya transparansi dan akuntabilitas. Pemenuhan indikator ini dapat menjadi penilaian kualitas terhadap tata kelola keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut. Kemudian melakukan pendalaman dengan analisis dan telaah sehingga didapatkan informasi yang jelas sehingga dapat menjadi bahan kajian yang memuat hipotesis terkait dampak variabel satu dengan variabel lainnya di penelitian selanjutnya. Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Dalam proses analisis data serta informasi yang diperlukan maka dibutuhkan kajian pustaka melalui *mendeley*, *google scholar*, maupun artikel jurnal internasional untuk menggali hipotesis dan teori secara lebih jelas. Dalam kajiannya, metode ini membutuhkan kemampuan dalam mengeksplorasi hasil dari temuan-temuan jurnal riset ataupun karya ilmiah terdahulu dan fenomena yang terjadi sekarang sehingga dapat dikritisi dan dianalisis. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya dampak positif antara transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut. Transparansi memberikan citra, partisipasi, serta kelengkapan laporan. Sementara pada akuntabilitas membentuk ketepatan penerbitan setahun sekali sesuai Peraturan Pemerintah. Kesimpulannya keduanya sama-sama memiliki dampak positif bagi kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut sehingga dapat menaikkan nilai instansi.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas Keuangan, Tata Kelola

## **PENDAHULUAN**

Dalam mewujudkan *good governance*, diperlukannya indikator pengukuran serta syarat wajib sehingga sebuah tata kelola dapat dikategorikan baik atau buruk. Indikator yang dapat diukur harus bersifat transparansi dan akuntabilitas dalam hal keuangan di sebuah instansi [1]. Setiap laporan dan sistem tata kelola keuangan harus diwujudkan dengan baik sehingga terjadi *clean governance*. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang *urgent* saat ini untuk meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan atas dana masyarakat yang digunakan dan dikelola [2]. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang disusun secara terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan. Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Akutansi Pemerintah Nomor 1 Paragraf 9 [3].

Tata kelola yang baik merupakan sebuah pelaksanaan atau penyelenggaraan

manajemen yang memenuhi pada setiap aspek-aspeknya. Pada saat ini, tata kelola dapat menunjukkan kedudukan *good governance*. *Good governance* merupakan bagian dari mencapai cita-cita serta impian guna mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh semua masyarakat [3]. Dalam pengertiannya, transparansi merupakan keterbukaan yang menjelaskan tentang keadaan kegiatan yang akan dilaksanakan, sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan ataupun sumber-sumber daya yang digunakan selama kegiatan sehingga ada informasi yang disampaikan [3]. Sedangkan, akuntabilitas merupakan kemampuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dalam pembangunan di pemerintahan [4]. Jika dilihat urgensi kedua indikator tersebut, maka keduanya tidak dapat dipisahkan apabila ingin menjalankan tata kelola keuangan secara baik. Namun, faktanya di lapangan kedua inidkator ini masih belum bisa diterapkan secara maksimal.

Peran laporan keuangan dalam sebuah instansi menjadi sangat penting karena dalam proses pembuatannya dimuat semua kegiatan dari awal hingga akhir yang berasal dari dana rakyat. Kualitas laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memiliki kepengawasan serta secara sistematis tersusun sebagaimana Peraturan Pemerintah. Peranan laporan keuangan tidak terlepas dari digunakan untuk mengetahui nilai dan bentuk tanggung jawab sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan [5]. Kemudian, laporan keuangan juga memiliki peran untuk menilai kondisi keuangan sebuah instansi termasuk Kementerian. Lalu, laporan keuangan yang baik dapat dijadikan sebuah bahan evaluasi dalam melakukan penilaian dan membantu untuk menentukan efisiensi dari sebuah pelaporan [6]. Jika ditelaah secara hakikat, maka kualitaslaporan keuangan dapat menunjukkan seberapa tanggung jawabnya pemerintah atau instansi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana atau keuangan selama ini. Informasi keuangan yang disajikan pemerintah dijadikan dasar sebagai sikap untuk memahami anggaran-anggaran agar tidak mengalami kesalahan informasi pengelolaan dana di Kementerian [7].

Laporan keuangan yang memiliki mutu dapat dimanfaat sebagai sarana dalam membuat sebuah keputusan untuk kebijakan sehingga dalam tata kelola keuangan diperlukan tanggung jawab agar informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh masyarakatuntuk dijadikan sebuah kajian atau informasi keuangan [8]. Selain itu, laporan keuangan juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah [6]:

1. Meningkatkan rasa percaya publik terhadap lembaga pemerintah termasuk Kementerian
2. Memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jelas kepada publik terkaitkeseluruhan pengelolaan dana selama di instansi dalam mengelola sumber daya

3. Sebagai media perhitungan secara publik atau masyarakat yang dapat dipercaya
4. Mempertanggung jawabkan kegiatan dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan masyarakat
5. Dapat menentukan dan memperkirakan kondisi keuangan yang terjadi selama pengelolaan di dalam instansi
6. Mengevaluasi terkait penggunaan sumber daya ekonomi dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan dan target kegiatan

Dalam penerapannya, tata kelola keuangan memiliki aktivitas seperti membuat perencanaan, melakukan pelaksanaan, menatausahakan, membuat laporan, mempertanggung jawabkan, serta pengendalian (mengawasi) pengelolaan [9]. Perencanaan merupakan sebuah kegiatan yang menjadi awal untuk mengambil keputusan menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dijadikan implementasi (alokasi) dana [10]. Melakukan pelaksanaan dan menatausakan adalah kegiatan yang berfokus pada sistem pengelolaan dana saat kegiatan berlangsung [11]. Membuat laporan adalah kegiatanyang dilakukan secara sistematis untuk menyusun setiap alokasi dana dan kegiatan yang telah dilaksanakan, belum dilaksanakan, ataupun hal-hal yang dipergunakan selama kegiatan berlangsung nantinya [12]. Mmpertanggung jawabkan adalah kegiatan di mana orang yang berikan tugas dalam tata kelola keuangan dapat memberikan kesungguhan dan kedisiplinan serta sikap profesionalisme dalam membuat laporan pendanaan kegiatan sehingga terjadi keterbukaan secara jujur terhadap pengelolaan dana [13]. Pengendalian (mengawasi) merupakan kegiatan monitoring untuk melakukan pemantauan atau pengecekan terkait hal-hal yang telah dilaporkan sehingga meminimalisir kesalahan penginformasian pengelolaan keuangan dan melakukan evaluasi sehingga ada kegiatan perbaikan ke depannya [14]. Tata kelola keuangan di lembaga pemerintahan seperti Kementerian harus memiliki sebuah sistem pengelolaan dengan akurasi yang tinggi sehingga hasil yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan dan dilaporkan sejelas-jelasnya dengan terbuka. Sistem pelaksanaan tata kelola keuangan yang berkualitas dapat memberikan keterbukaan dalam penelusuran keuangan dengan penjelasan transaksi ataupun pengelolaan lainnya [4].

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut). Kementerian Agama merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas dan

bertanggung jawab dalam urusan agama ke negara. Pada fenomena transparansi dan akuntabilitas diketahui ada hal positif yang membuat tata kelola keuangan di Kemenag Sumut dapat dikategorikan menjadi baik. Hal ini disebabkan karena adanya keterbukaan dari lembaga terhadap pengelolaan dana kegiatan dengan membuat laporan dana selama setahun dan hal ini kemudian dipublikasikan secara *open acses* kepada masyarakat melalui website. Hal ini menimbulkan perspektif yang baik kepada citra kualitas tata kelola keuangan Kemenag Sumut di masyarakat. Kondisi ini menjadi trend positif yang dapat diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

Dalam keberhasilan tata kelola keuangan di Kemenag Sumut ada beberapa faktor pendukung ataupun pendorong sehingga memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas [15]. Adapun faktor pendukungnya seperti kinerja dari SDM (Sumber Daya Manusia) di mana orang yang ditempatkan dalam menanggung jawab sistem pengelolaan dana dalam tata kelola adalah orang yang memiliki kapabilitas di bagian tersebut. Kemudian, ada alat yang memadai di mana Kemenag Sumut memfasilitasi komputer bagi pegawai untuk membuat laporan secara baik dan rinci. Lalu ada komitmen, di mana setiap pegawai memiliki rasa tanggung jawab, bangga, jujur, serta bersungguh-sungguh dalam memberikan laporan yang terbaik sehingga menciptakan transparansi dan kapabilitas terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas [16].

Dampak dari transparansi dan kapabilitas terhadap kualitas tata kelola keuangan di suatu instansi dapat memberikan efek yang signifikan dalam meningkatkan rasa tanggung jawab serta citra instansi di masyarakat. Kemudian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan karena pengelolaan dana (keuangan) dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan selama adanya pelaksanaan kegiatan [17]. Selain itu, dapat mengurangi pendendaan sehingga terhindar dari ketidakjujuran selama pengelolaan.

Seperti yang telah dijelaskan dan diuraikan secara ringkas serta jelas mengenai urgensi transparansi dan kapabilitas dalam tata kelola keuangan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi memiliki dampak positif atau bermakna terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut?
2. Apakah kapabilitas memiliki dampak positif atau bermakna terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut. Kemudian melakukan pendalaman dengan analisis dan telaah sehingga didapatkan informasi yang jelas sehingga dapat menjadi bahan kajian yang memuat hipotesis terkait

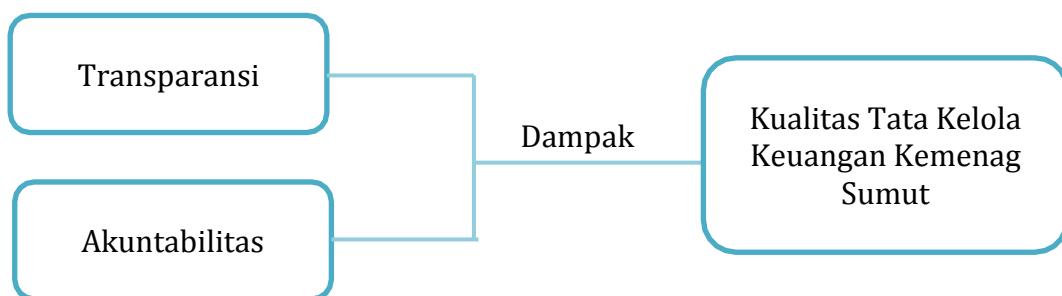
dampak variabel satu dengan variabel lainnya di penelitian selanjutnya.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang fokus pada fenomena melalui penamatan serta menelaah secara lebih mendalam terkait kejadian yang diteliti sehingga didapatkan informasi lebih jelas dan rinci terkait aspek-aspek yang terlibat [18]. Pendekatan studi kepustakaan yang digunakan untuk melakukan pendalaman analisis pada variabel merupakan metode dalam mengumpulkan informasi serta data dengan memahami berbagai macam teori serta hasil dari karya ilmiah peneliti sebelumnya untuk dijadikan literatur baik dalam buku, dokumen, ataupun karya ilmiah lainnya [19]. Dalam proses analisis data serta informasi yang diperlukan maka dibutuhkan kajian pustaka melalui mendeley, google scholar, maupun artikel jurnal internasional untuk menggali hipotesis dan teori secara lebih jelas. Dalam kajiannya, metode ini membutuhkan kemampuan dalam mengeksplorasi hasil dari temuan-temuan jurnal riset ataupun karya ilmiah terdahulu dan fenomena yang terjadi sekarang sehingga dapat dikritisi dan dianalisis [20]. Penelitian ini juga berdasarkan pengalaman berada di tempat selama masa magang di Kementerian Agama Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan yang dicari maka ada sebuah konsep yang didapatkan terkait transparansi dan akuntabilitas sehingga memberikan dampak terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kementerian Agama Sumatera Utara. Adapun peta konsep tersebut adalah:



Gambar 1. Peta  
Konsep  
Variabel

## **Dampak Transparansi Terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan di Kementerian Agama Sumatera Utara**

Transparansi merupakan hak dari rakyat atau masyarakat untuk mengetahui pengelolaan sumber dana sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kualitas tata kelola keuangan dalam Kementerian Agama Sumatera Utara. Transparansi sendiri dibangun atas hak adanya kebebasan dalam memperoleh informasi, yang artinya masyarakat dapat memperoleh informasi secara publik demi kepentingan mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan [21]. Transparansi yang dilakukan Kementerian Agama Sumatera Utara dalam memberikan laporan keuangan ternyata memnimbulkan dampak positif yang signifikan terhadap penilaian kualitas tata kelola keuangan.

Dampak positif ini diartikan sebagai semakin transparan laporan keuangan yang dibuat maka semakin bagus pula kualitas dari Kementerian Agama Sumatera Utara. Artinya, ada kejujuran dan kedisiplinan selama mengalokasikan pengelolaan dana dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dikatakan sebagai pemegang amanah. Penelitian terdahulu juga menemukan semakin baik kualitas tata kelola keuangan sebuah instansi maka menjadikan instansi tersebut lebih informatif atau terbuka kepada masyarakat [22].

Kementerian Agama Sumatera Utara juga menjunjung nilai kejujuran dan menjauhi perilaku serta sikap berkhianat (curang). Hal ini diungkapkan karena dapat merusak integrasi serta prinsip dalam agama sehingga setiap laporan harus dibuat sebagaimana apa adanya dan memang benar alokasi dana yang dilaporkan dengan jumlah yang sebenarnya. Selaras dengan penelitian terdahulu, bahwa sikap transparansi membawa dampak yang positif karena dapat menjadi salah satu penghambat adanya kegiatan yang dilakukan secara sembunyi ataupun rahasia sehingga tidak ada penyelewengan yang dapat memberikan efek buruk bagi kesejahteraan masyarakat [23]. Hal ini juga sebagaimana telah tercantum dalam ayat Al-Quran dan Hadist tentang berlaku jujur dan menghindari khianat [24]: “*Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan megantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.*” (HR. Muslim no. 2607)

Selain itu, transparansi membuat penilaian masyarakat terhadap Kementerian Agama Sumatera Utara semakin baik. Proses kepercayaan masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pelaksanaan sehingga alokasi dana serta pengelelolaan keuangan semakin tepat sasaran. Partisipasi masyarakat apabila naik dengan signifikan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan memiliki kualitas yang baik

sehingga masyarakat mau ikut andil terlibat dalam prosesnya [25].

### **Dampak Akuntabilitas Terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan di Kementerian Agama Sumatera Utara**

Dalam maknanya, akuntabilitas sendiri merupakan sebuah prinsip yang di mana seseorang yang bertanggung jawab dalam hal menyajikan, melaporkan, serta menyusun semua kegiatan yang ada kepada pemberi amanah untuk diberikan kepada pihak pengelolaan [26]. Akuntabilitas sendiri memberikan efek yang dominan sehingga sangat mempengaruhi kualitas tata kelola keuangan di Kementerian Agama Sumatera Utara. Salah satu hal yang menjadi indikator penilaian adanya akuntabilitas dalam Kemenag Sumut adalah bagaimana kepatuhan lembaga terhadap hukum yang berlaku seperti dalam Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang mengatur standarisasi pelaporan keuangan sehingga tidak terjadi persinggungan antara satu dengan lainnya serta dapat dipertanggung jawabkan apabila terdapat kesalahan yang sangat fatal. Dalam akuntabilitas ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebuah gambaran serta ciri-ciri akuntabilitas yang baik sehingga dapat memberikan dampak positif pada tata kelola keuangan di Kemenag Sumut, antara lain [7]:

1. Adanya keterbukaan terkait kapabilitas atau kemampuan seseorang untuk menyampaikan realita kondisi kualitas keuangan
2. Memiliki kewajiban dalam memberikan konsekuensi dalam penyusunan laporan keuangan
3. Mampu mengendalikan dan mengawasi tata kelola keuangan yang sudah di amanahkan
4. Mempertanggungjawabkan semua pekerjaan sebagaimana standart yang telah ditentukan
5. Upaya pemenuhan kepentingan dari pemangku jabatan sesuai dengan harapan

Pelaksanaan akuntabilitas memiliki dampak yang bermakna terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut. Hal ini disebabkan adanya nilai wibawa serta rasa takut terhadap hukum kemudian dapat dilihat dari bagaimana penyajian laporan yang diterbitkan dalam satu tahun sekali sehingga dapat memberikan gambaran adanya pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Selain itu, di dalam islam nilai akuntabilitas sama dengan amanah sebagaimana yang telah diriwayatkan [27]: *Diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiallahu'anhu, ia menuturkan mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, “semua kamu adalah pemimpin dan seluruh pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka yang dipimpin. Imam (presiden, raja) adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Suami adalah pemimpin dalam*

*keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya itu. Istri adalah pemimpin di rumah tangganya dan bertanggung jawab atas rumah tangganya itu. Pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Dan, kalian semua adalah pemimpin serta bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Secara signifikan jika ditinjau dari penelitian terdahulu, akuntabilitas sangat mempengaruhi tata kelola keuangan. Bahkan dalam beberapa penelitian, prinsip ini dijadikan sebuah bahan evaluasi untuk mempertanggung jawabkan keadaan keuangan yang ada dalam kegiatannya. Memperlihatkan tanggung jawab merupakan efek dari adanya kualitas yang baik [7].

## KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan yang telah diberikan oleh peneliti, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Transparansi memberikan dampak yang positif terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut. Hal ini tercermin dari kejuran laporan, kelengkapan laporan, citra, maupun partisipasi masyarakat.
2. Akuntabilitas juga memberikan dampak yang positif terhadap kualitas tata kelola keuangan di Kemenag Sumut. Hal ini tercermin dari bagaimana penerbitan laporan dalam setahun sekali sesuai dengan hukum yang berlaku serta *detail* informasi yang diberikan oleh penanggung jawab atas laporan yang dikeluarkan.

## SARAN

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti terkait penelitian yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain dapat memberikan tambahan variabel yang dapat menjadi indikator penilaian kualitas tata kelola keuangan
2. Bagi pemerintahan, menyediakan informasi literatur yang lebih banyak terkait kajian kualitas tata kelola keuangan khususnya di Kementerian

## REFERENSI

- [1] S. Fauziah, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan IT CENTER di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru,” *J. As Siyasah*, vol. 4, no. 2, pp. 63–65, 2019.
- [2] A. Sumbar, “Wujudkan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel,” <https://sumbar.kemenag.go.id/>, 2013.  
<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/31410/wujudkan-pengelolaan-keuangan-dan-bmn-yang-transparan-dan-akuntabel.html> (accessed Sep. 08, 2023).
- [3] R. L. Septian, A. Wawo, and R. Jannah, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi,” *ISAFIR Islam. Account. Financ. Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 179–193, 2022, doi: 10.24252/isafir.v2i2.25485.
- [4] C. Ulya and E. B. Astuti, “Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab Tegal, Bumd Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat Dan Lurah Kab Tegal),” *AKSES J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 13, no. 2, pp. 63– 79, 2020, doi: 10.31942/akses.v13i2.3242.
- [5] C. Sososutiksno, “the Effect of Transparency , Accountability and Leadership on the Effectiveness of Village Fund Management,” *GEMILANG J. Manaj. dan Akunt.*, vol. 3, no.2, pp. 179–189, 2023.
- [6] Erniati, “Laporan Keuangan Pemerintah Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara,” <https://djpb.kemenkeu.go.id/>, 2019.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html#:~:text=satu> periode pelaporan.-, Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui (accessed Sep. 08, 2023).
- [7] M. L. B. Kromen, H. A. Manafe, and M. . Perseveranda, “Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah),” *J. Ilmu Manaj. Terap.*, vol. 4, no. 4, pp. 460–468, 2023.
- [8] A. P. Karunia, P. Payamta, and S. Sutaryo, “The Implementation of Accrual-based Accounting in Indonesian Government: Has Local Government Financial Statement Quality Improved?,” *J. Account. Invest.*, vol. 20, no. 2, 2019, doi: 10.18196/jai.2002115.
- [9] D. D. Oktavia and I. Ratnasari, “Model tata kelola keuangan sebagai upaya keberlangsungan usaha dimasa pandemic covid-19,” vol. 5, no. 9, pp. 3593–3599, 2023.
- [10] Yulfiswandi, I. M. Noviany, J. C. Jongestu, Keven, M. I. Sari, and S. Eliya, “Pentingnya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan di Usia Muda untuk Masa

- Mendatang,” *YUME J. Manag.*, vol. 5, no. 2, pp. 569–579, 2022, doi: 10.37531/yume.vxix.4456.
- [11] H. Chandra and C. F. Wijaya, “The Relevance of Financial Statements in the Industrial Revolution 4.0 Era,” *Binus Bus. Rev.*, vol. 12, no. 1, pp. 75–84, 2021, doi: 10.21512/bbr.v12i1.6802.
- [12] Y. Andriyan, “Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019,” *J. Pemerintah. dan Kebijak.*, vol. 3, no. 1, pp. 47–54, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/12847>
- [13] B. Nurrizkiana, L. Handayani, and E. Widiastuty, “Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders,” *J. Akunt. dan Investasi*, vol. 18, no. 1, pp. 28–47, 2017, doi: 10.18196/jai.18159.
- [14] M. Edowati, H. Abubakar, and M. Said, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai,” *Indones. J. Bus. Manag.*, vol. 4, no. 1, pp. 87–96, 2021, doi: 10.35965/jbm.v4i1.1184.
- [15] et al. Azwan, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana Pembangunan Desa di Kabupaten Rokan Hilir,” *J. Agribisnis*, vol. 22, no. 1, pp. 1–15, 2020.
- [16] Suherwan and Kamaliah, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas),” *J. Tepak Manaj. Bisnis*, vol. IX, no. 2, pp. 201–214, 2017.
- [17] A. Salle, “Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” KEUDA (*Jurnal Kaji. Ekon. dan Keang. Daerah*), vol. 1, no. 1, pp. 1–19, 2017, doi: 10.52062/keuda.v1i1.740.
- [18] Anton Wibisono, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, 2019. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> (accessed Sep. 09, 2023).
- [19] M. N. Adlina, A. H. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, and S. J. Merliyana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Edumaspul J. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 974–980, 2022, doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- [20] P. Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan,” *Penelit. Kepustakaan (Liberary Res.*, no. April, p. 15, 2020.
- [21] Z. Maulana and Lubis N.S, “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan,” *J. Penelit. Ekon. Akunt.*, vol. 4 Nomor 1, no. 2655–187X, pp. 1–14, 2020.
- [22] S. Syamsul and I. T. Ritonga, “Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia,” *J. Akunt.*, vol. 21, no. 3, p. 448, 2017, doi:

- 10.24912/ja.v21i3.251.
- [23] W. Beekes, P. Brown, and Q. Zhang, “Corporate governance and the informativeness of disclosures in Australia : A re-examination Corporate governance and theinformativeness of disclosures in Australia : A re-examination”.
  - [24] M. A. Tuasikal, “Mencari Orang yang Jujur Itu Sulit,” <https://rumaysho.com/>, 2011. <https://rumaysho.com/1873-mencari-orang-yang-jujur-itu-sulit.html> (accessed Sep. 09, 2023).
  - [25] N. A. Setianingsih, W. K. Asmoro, and E. Putranti, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat,” Owner, vol. 6, no. 4, pp. 3860–3869, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i4.1127.
  - [26] J. Akuntansi, F. Ekonomi, D. A. N. Bisnis, U. Islam, and N. Alauddin, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru),” pp. 1–113, 2021.
  - [27] Kumparan, “Hadits tentang Tanggung Jawab yang Bisa Dijadikan Bahan Renungan Umat Islam,” <https://kumparan.com/>, 2021. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hadits-tentang-tanggung-jawab-yang-bisa-dijadikan-bahan-renungan-umat-islam-1wlMba9vErg>